

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN DANA BERGULIR

Akhirrudin dan Abdul Sadad

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Policy Implementation Assistance Revolving Fund. In District. This study aims to determine the implementation of a revolving fund in Kampar Kiri Hulu subdistrict and the factors that influence the rolling refund that is not in accordance with what had been expected by the local governments and communities. The public is invited to attend some sort of training in accordance with the existing potential in their village, in the form of training in the field of animal husbandry for villages that have great potential in the field of animal husbandry and so on. Meanwhile, the implementation of the program, especially in Kampar Kiri Hulu subdistrict based on the data I get from the local Office. It turns out that the government expected results contrary to what happens on the field, where almost all the beneficiaries of the revolving fund not repay their loans with varying reasons that the presence of dead animals, lost and do not want to pay because there are other groups who did not return the their loans.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Bergulir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana bergulir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana bergulir yang tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat diundang untuk mengikuti semacam pelatihan sesuai dengan potensi yang ada di desa mereka, berupa pelatihan di bidang peternakan bagi desa-desa yang mempunyai potensi besar dibidang peternakan dan seterusnya. Sementara itu, dalam implementasi Program tersebut khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas setempat. Ternyata hasil yang diharapkan pemerintah bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana hampir seluruh pemanfaat dari dana bergulir tidak mengembalikan pinjaman mereka dengan alasan-alasan yang bervariasi yakni adanya ternak yang mati, hilang dan tidak mau membayar karena ada kelompok lain yang juga tidak mengembalikan pinjaman mereka.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, bantuan dana bergulir

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan program lima pilar pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program tersebut adalah peningkatan akhlak dan moral, meningkatkan ekonomi rakyat, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan infrastruktur. Kelima pilar tersebut dikerucutkan menjadi tiga zero, yang diharapkan akan mampu menzerokan kemiskinan, menzerokan pengangguran dan menzerokan rumah-rumah kumuh dalam wilayah Kabupaten Kampar. Sejak berjalannya program lima pilar pembangunan di Kabupaten Kampar dan tepatnya sejak satu tahun terakhir, ternyata angka kemiskinan di Kampar berhasil diturunkan sebesar 3 persen lebih. Pada akhir tahun 2012 angka kemiskinan hanya tercatat sebesar 19 persen lebih.

Permintaan terhadap bahan pangan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah pen-

duduk tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi pangan karena pertumbuhan penduduk berdasarkan deret angka sedangkan pertumbuhan produksi pangan berdasarkan deret ukur. Hal ini menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya) Karya Nyata Kubang Jaya di Kabupaten Kampar, dengan target utama masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Masyarakat yang berdomisili di desa desa terpencil tersebut diundang untuk mengikuti semacam pelatihan sesuai dengan potensi yang ada di desa mereka, berupa pelatihan di bidang peternakan bagi desa-desa yang mempunyai potensi besar dibidang peternakan dan seterusnya. Yang kemudian dibagi kedalam kelompok/angkatan yang berkesinambungan. Sampai saat ini sudah sampai ke angkatan XVI (Dinas Peternakan Kabupaten Kampar 2013). Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 15 hari dengan instruktur yang didatangkan dari IPB yang memang khusus

didatangkan Pemerintah Kabupaten Kampar. Umumnya setiap desa mengirimkan utusannya dengan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat Setempat. Setelah mereka mendapatkan ilmu dalam masing-masing bidang yang mereka tekuni, maka peserta pelatihan tersebut mendapatkan sertifikat dari dinas terkait yang diketahui oleh Bupati Kampar. Dengan modal keahlian dan sertifikat tersebut maka peserta pelatihan berhak mendapatkan rekomendasi Pinjaman dana Bergulir dari Bank yang telah ditunjuk dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini BPD Sarimadu.

Masing-masing peserta berhak mendirikan suatu kelompok tani dengan anggota maksimal 10 orang dalam tiap kelompok yang berkompeten di bidangnya. Setiap kelompok dapat mengajukan permohonan pinjaman hingga di atas 100 juta sesuai dengan bidang usaha kelompok tersebut, dengan menjaminkan Sertifikat Tanah ke bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Selanjutnya bank bersangkutan melakukan verifikasi kelengkapan dan kemudian memberikan pinjaman sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan. Hal ini terus digagas dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan harapan dapat men-sukseskan lima pilar pembangunan Kabupaten Kampar yang dimulai dari pedesaan sebagai wilayah paling rentan terkena dampak kemiskinan. Sementara itu, dalam implementasi Program tersebut khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas setempat. Berikut nama orang/kelompok yang memperoleh bantuan dana bergulir yang di prioritaskan untuk usaha beternak sapi dan sebagian kecil untuk usaha pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana bergulir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana bergulir yang tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

METODE

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang hal-hal yang ber-

kaitan dengan implementasi penerapan dana bergulir, sikap para pelaksana, hubungan dan komunikasi dengan instansi lain dan hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran tentang objek penelitian, seperti proses untuk mendapatkan dana bergulir, pembayarannya dan lain-lain. Dokumentasi pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bisa diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, studi kepustakaan, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan bantuan dana bergulir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ekonomi kerakyatan adalah sebuah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Dimana kebijakan suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah, dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan. Tujuan dari terbitkannya kebijakan ekonomi kerakyatan ini adalah untuk membantu para wirausahawan menengah dan kecil untuk dapat dan mampu mengembangkan usahanya. Sedangkan dalam penelitian kebijakan program ekonomi kerakyatan yang diberikan bertujuan untuk membantu para petani dalam mengembangkan usahanya dengan membantu permodalan para petani. Implementasi dari program ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan diwujudkan melalui program pinjaman dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan tahap-tahap yang dilakukan dalam pengguliran dana tersebut, penulis akan menganalisisnya dengan mengevaluasi program ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang disalurkan melalui program dana pinjaman dana bergulir kepada para masyarakat petani. Diharapkan nantinya ditemukan penyebab program pinjaman dana bergulir dalam pelaksanaannya gagal dalam meningkatkan produksi hasil perkebunan petani.

Tahap Persiapan

Tahapan persiapan adalah pimpinan proyek atas nama Dinas Pertanian mempersiapkan dan membahas segala rencana yang akan dilaksanakan dalam rangka menggulirkan pinjaman modal kepada masyarakat. Adapun dalam tahap persiapan pimpinan proyek harus melakukan kegiatan:

- Mensosialisasikan adanya dana pinjaman modal dana bergulir kepada masyarakat petani
- Identifikasi lokasi penyaluran dana bergulir kepada masyarakat
- Mempersiapkan kebutuhan teknis dalam penyaluran dana bergulir kepada masyarakat

Dari hasil wawancara dengan pihak dinas terkait di Kecamatan Kampar Kiri Hulu diperoleh informasi bahwa dalam melaksanakan beberapa kegiatan pada tahap persiapan ini tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja dalam mensosialisasikan pinjaman dana bergulir kepada petani, para petani banyak yang tidak ikut berpartisipasi padahal agenda kegiatan sudah diinformasikan jauh hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan namun hanya sebagian kecil petani yang hadir. Sedangkan untuk mempersiapkan kebutuhan teknis, dinas terkait juga sudah difasilitasi oleh tim verifikasi dana bergulir Kabupaten Kampar.

Tahap Permohonan

Tahap permohonan adalah pimpinan proyek atas nama dinas menerima surat permohonan bantuan dana bergulir dari masing-masing masyarakat yang melakukan permohonan dengan melampirkan proposal kelayakan usaha dan persyaratan lain sesuai perjanjian. Adapun pada tahap permohonan meliputi kegiatan berikut:

- Membuat proposal permohonan kepada pimpinan proyek guna mendapat pinjaman dana bergulir
- Mensosialisasikan syarat-syarat permohonan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat
- Mengetahui kriteria bidang usaha yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir

Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, diperoleh informasi bahwa dalam

melaksanakan berbagai kegiatan dalam tahap permohonan ini tim teknis dinas sudah bisa melaksanakannya sesuai dengan arahan yang diberikan. Dalam hal membuat proposal permohonan bantuan misalnya, tim teknis selalu ada dan mendampingi petani untuk memberitahukan bagaimana cara membuat permohonan yang benar. Begitu juga dalam hal mensosialisasikan syarat-syarat permohonan dan jenis usaha yang akan memperoleh bantuan dana bergulir, tim teknis sudah bisa menyampaikan kepada petani dengan baik dan benar.

Tahap Seleksi

Tahap seleksi adalah pimpinan proyek atas nama Dinas melakukan seleksi dan penilaian terhadap proposal kelayakan usaha yang diajukan peminjam dalam rangka untuk menerima bantuan pinjaman dana bergulir. Adapun dalam tahap seleksi ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pimpinan proyek melakukan seleksi dan penilaian terhadap proposal yang diajukan pemohon
- Melakukan kunjungan lapangan terhadap usaha yang diajukan oleh pemohon
- Melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan

Dalam tahap ini tim teknis dinas diharuskan untuk menyeleksi setiap permohonan bantuan yang diajukan petani. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait dapat diperoleh informasi bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan proposal yang diajukan petani tidak sesuai dengan kondisi di lapangan serta tidak layak untuk memperoleh pinjaman dana bergulir. Setelah dilakukan kunjungan lapangan terhadap usaha para petani, maka ditemukan lahan usaha para petani sudah tidak terawat dan dipenuhi semak belukar.

Tahap Penetapan

Tahap penetapan adalah pimpinan proyek atas nama Dinas menetapkan calon penerima bantuan pinjaman dana bergulir yang lulus melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh pimpinan proyek. Adapun dalam tahap penetapan meliputi kegiatan :

- Pimpinan proyek menetapkan calon penerima

- bantuan pinjaman dana bergulir
- Menyampaikan hasil penetapan kepada calon penerima bantuan pinjaman
- Menunjuk pihak bank yang akan mencairkan dana pinjaman

Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, diperoleh informasi bahwa tim menetapkan siapa yang berhak memperoleh pinjaman dan berapa jumlah pinjaman yang bisa direalisasikan. Tidak semua nominal yang diajukan petani bisa direalisasikan dengan maksimal karena terlebih dahulu dikaji mengenai resiko tanggungan petani yang kalkulasikan dengan kondisi usaha petani.

Tahap Pencairan Dana

Tahap pencairan dana adalah pimpinan proyek atas nama Dinas yang telah menetapkan peminjam yang berhak menerima pinjaman dana bergulir, setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas dapat mencairkan dana pinjamannya melalui bank penyalur yang sudah ditunjuk. Adapun dalam tahap pencairan dana meliputi kegiatan :

- Calon penerima pinjaman modal harus mencairkan dana sesuai dengan proposal dan rekomendasi yang telah diberikan.
- Membuat nomor rekening pada bank penyalur yang sudah ditunjuk untuk mencairkan dana
- Calon penerima pinjaman modal harus menandatangani surat akses/pengukuhan berhutang secara notarial.

Dalam hal ini tim teknis tidak menghadapi kendala yang berarti, hanya saja setelah dilakukan wawancara dengan tim teknis diperoleh informasi bahwa hampir seluruh petani sebelumnya tidak mempunyai akses dengan bank penyalur sehingga sebelum dana petani dicairkan terlebih dahulu mereka harus membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Tahap Pengembalian Dana

Adapun tahap pengembalian dana meliputi kegiatan :

- Pimpinan proyek menetapkan jangka waktu pinjaman maksimal
- Pemohon diwajibkan mengangsur pinjaman

modal beserta bunganya

- Pihak bank yang ditunjuk harus mengarsipkan angsuran dana pinjaman dan menerbitkan secara berkala laporan status pinjaman dana bergulir.

Tanggapan responden tentang tahap pengembalian dana ada sebanyak 2 orang (15,4%) yang menyatakan setuju, ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menetapkan dan mensosialisasikan kepada petani mengenai batas waktu pengembalian dana pinjaman yang telah diberikan kepada para petani. Hal ini bertujuan agar petani tidak lupa untuk mengembalikan dana bantuan, sehingga program bantuan dana bergulir untuk waktu yang akan datang masih terus dapat dilakukan. Kemudian ada sebanyak 10 orang (76,9%) yang mengatakan kurang setuju, ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang mampu menetapkan dan mensosialisasikan kepada petani mengenai batas waktu pengembalian dana pinjaman yang telah diberikan kepada para petani. Akibatnya banyak petani yang teledor dan terlupa untuk melunasi semua dana pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada 1 orang (7,7%) yang mengatakan tidak setuju, ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang mampu menetapkan dan mensosialisasikan kepada petani mengenai batas waktu pengembalian dana pinjaman yang telah diberikan kepada para petani. Sehingga dana pengembalian tidak dapat terkumpul sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak mampu disalurkan kembali untuk program bantuan dana bergulir berikutnya.

Melihat tanggapan responden tentang kewajiban mengangsur pinjaman beserta bunganya ada sebanyak 13 orang (100%) yang mengatakan setuju, ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menyarankan kepada petani yang memiliki kewajiban mengangsur dana pinjaman beserta bunganya. Sehingga dengan terkumpulnya dana kembali berarti program bantuan dana bergulir masih tetap bias dilaksanakan. Kemudian tidak ada yang mengatakan kurang setuju, ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyarankan kepada petani yang memiliki kewajiban mengangsur dana pinjaman beserta bunganya, selanjutnya tidak ada yang tidak setuju, ini

menunjukkan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menyarankan kepada petani yang memiliki kewajiban mengangsur dana pinjaman beserta bunganya.

Melihat tanggapan responden tentang mengarsipkan angsuran dana dan diterbitkan secara berkala ada sebanyak 3 orang (23,1%) yang mengatakan setuju. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengarsipkan angsuran dana yang dilakukan petani sebagai bukti pengembalian dana. Kemudian ada sebanyak 7 orang (53,8%) yang mengatakan kurang setuju, ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang mampu mengarsipkan dana angsuran yang disetorkan petani dan menerbitkannya secara berkala. Selanjutnya ada sebanyak 3 orang (23,1%) yang mengatakan tidak setuju, ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang mampu mengarsipkan dana angsuran yang disetorkan petani dan menerbitkannya secara berkala. Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya koordinasi antara pihak bank penyalur dan pemerintah untuk mengarsipkan dana bantuan yang telah disetorkan petani kepada pemerintah.

Hasil rata-rata tanggapan responden tentang proses pencairan dana ada sebanyak 18 orang (46%) yang mengatakan sesuai, ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menetapkan jangka waktu pinjaman, mampu menyarankan petani untuk mengangsur kewajiban beserta bunganya dan mampu mengarsipkan angsuran dana pinjaman dan menerbitkannya secara berkala. Kemudian ada sebanyak 17 orang (44%) yang mengatakan kurang sesuai, ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang mampu menetapkan jangka waktu pinjaman, kurang mampu menyarankan petani untuk mengangsur kewajiban beserta bunganya dan mampu mengarsipkan angsuran dana pinjaman dan menerbitkannya secara berkala. Selanjutnya ada sebanyak 1 orang (10%) yang mengatakan tidak sesuai, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menetapkan jangka waktu pinjaman, tidak mampu menyarankan petani untuk mengangsur kewajiban beserta bunganya dan mampu mengarsipkan angsuran dana pinjaman dan menerbitkannya secara berkala. Hal ini jugayang menyebabkan hampir semua pemanfaat dana bergulir tidak dapat

mengangsur pinjamannya kepada pemerintah dikarenakan kendala-kendala kerugian para petani dalam melaksanakan usahanya. Juga disebabkan oleh minimnya pengalaman, keterbatasan pengetahuan tentang usaha yang mereka geluti serta hal-hal lain yang merupakan penyebab macetnya pengembalian pinjaman oleh para petani kepada pemerintah.

Dari kendala dan hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memperbaiki tahapan yang dilakukan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat. Selain itu juga melalui hambatan ini, pihak pemerintah dapat melakukan evaluasi untuk lebih baik dalam menyalurkan bantuan dana program ekonomi kerakyatan yang diberikan kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengembalian dana bergulir tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah yakni membantu mengembangkan usaha masyarakat petani dengan bantuan dana bergulir, yang pada kenyataannya dana tersebut hanya dimanfaatkan segelintir orang yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Dengan berbagai alasan yang pada tahapan-tahapan sebelumnya tidak pernah terlontar dari para peminjam khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dari 13 kelompok peminjam yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, belum satu orang pun yang mengembalikan pinjamannya.

Dari hasil rekapitulasi pengembalian dana pinjaman pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ada sebanyak 8 kelompok di bidang peternakan (peggemukan sapi), ada 3 kelompok (23%) yang menyatakan ternak mereka mati, dengan demikian dana otomatis sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Selanjutnya ada 2 kelompok (15,4%), menyatakan ternak mereka hilang, kemudian ada 3 kelompok berikutnya yang ikut-ikutan tidak membayar karena ada lima kelompok yang tidak mengembalikan pinjaman mereka.

Selanjutnya ada 4 kelompok yang bergerak di bidang pertanian. Satu kelompok (7,6%) menyatakan mereka gagal panen, akibatnya tidak

kelompok lainnya juga tidak membayar karena ada kelompok yang tidak mengembalikan pinjaman mereka. Akhirnya ada 7 kelompok (54%) yang ikut-ikutan tidak mengembalikan pinjaman mereka karena ada kelompok dalam bidang usaha mereka yang tidak mengembalikan. Di samping itu juga tidak ada sanksi tegas dari pihak pemerintah terhadap kelompok yang tidak mengembalikan pinjaman mereka. Sementara itu pihak pemerintah dan bank penyalur dana juga tidak begitu dipusingkan dengan tidak dikembalikannya pinjaman tersebut, karena bagaimanapun pihak pemerintah dan bank punya SKT peminjam dan surat berharga lainnya sebagai jaminan apabila ada masalah dalam pengembalian dana tersebut yang diminta pihak bank pada saat pencairan dana bantuan kepada masyarakat peminjam.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam memberikan bantuan dana bergulir sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan sosial ekonomi masyarakat dan pemahaman pelaku kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari hambatan dan kendala yang menyebabkan para petani sulit untuk mengembalikan dana bergulir, yaitu Dana bantuan program ekonomi kerakyatan yang diterima oleh petani tidak sepenuhnya digunakan untuk membangun dan mengembangkan usahanya, sehingga hasil produksi yang diterima tidak meningkat dan sulit untuk mengangsur pinjaman yang diterima. Kurangnya ke-

mampuan pihak penyalur dalam mensurvey lokasi usaha petani yang akan diberikan bantuan karena alasan letak geografis dan kesulitan sarana transportasi, karena tanpa observasi yang baik, tingkat kelayakan dari usaha yang dikembangkan penerima bantuan masih diragukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Bustanul, 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Brata kusuma, Dedi Supryadi dan Riyadi. 2004 *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fauzi, Noer, 2000. *Petani dan Pengusaha: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Pustaka Pelajar
- H.S. Dillon, 1999. *Pertanian Membangun Bangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Islamy, Irfan, 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averos Press
- Mubiyarto dan Boediono, 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPF
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Zulkarnaini, 2003. *Membangun Ekonomi Kerakyatan: Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Fokus Media.